

BANK PERKREDITAN RAKYAT: TEROBOSAN STRATEGIS BAGI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL

M. Syahirman Yusi

Prodi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl. Sriwijaya Negara, Palembang, 30139, Indonesia.

Abstract

Capital shortage was the main problem faced by the small scale enterprises. To solve the problem, in 2013 the government legislated the regulations no. 1 about microfinance. Rural banking or BPR was one of microfinance programs offered the capital and other policies to improve the small scale enterprises. This paper aimed to review the development strategy of the rural banking that supported small scale of food enterprise effectively in the form of financing, strengthening, and partnership in South Sumatera. Survey and interview technique were implemented to 225 samples and the data was analyzed by using both one way Anova Test and Structural Equation Modeling. The result of analysis showed that all of the program offered by the rural banking had supported the development of small scale enterprises. Further analysis indicated that not only proposed research hypothesis but also the theoretical model were not rejected.

Keywords: capital shortage, rural banking, small scale enterprise,

Usaha kecil di negara yang sedang berkembang hampir merupakan kegiatan ekonomi yang cukup besar dalam jumlah usaha dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Meskipun dalam kontribusi terhadap pendapatan nasional bruto masing-masing negara belum cukup tinggi sebagaimana usaha menengah dan besar, sektor ini tetap menjadi tumpuan bagi stabilitas ekonomi nasional. Sektor usaha kecil adalah sektor yang mampu berfungsi sebagai peredam dan penampung ledakan yang secara potensial dapat terjadi dengan meningkatnya pengangguran dari waktu ke waktu. Bagi Indo-

nesia di luar sektor pertanian, sektor ini memang merupakan kegiatan ekonomi yang sangat luas tersebar di seluruh wilayah dengan berbagai unit.

Usaha kecil sektor pangan yang merupakan topik penelitian ini, cukup banyak dijumpai di Sumatera Selatan yang dijadikan wilayah penelitian. Dengan potensi yang ada dan didukung oleh tersedianya sumber daya lokal, usaha kecil ini cukup memberikan arti bagi perkembangan investasi dan penyerapan tenaga kerja. Dari keseluruhan usaha kecil formal sektor pangan yang ada di Sumatera Selatan yang berjumlah 15.168 unit

Korespondensi dengan Penulis:

M. Syahirman Yusi: Telp +62 711 353 414

E-mail: msyusi@gmail.com

Bank Perkreditan Rakyat: Terobosanstrategis bagi Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Kecil

M. Syahirman Yusi

dengan nilai investasi Rp 52.005.657.000 dan tenaga kerja yang terserap sebanyak 47.189 orang, persentase jumlah usaha kecil ini cukup memberikan arti bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal. Ini berarti secara langsung dapat mengurangi pengangguran dan mengurangi masyarakat miskin yang kian bertambah dari tahun ke tahun.

Meskipun telah diupayakan pengembangannya, pada kenyataannya usaha kecil ini belum sepenuhnya terlepas dari masalah atau kendala yang dihadapi, terutama masalah keterbatasan modal, baik modal kerja maupun investasi bagi pengembangan usaha tetap merupakan hambatan. Masalah utama dalam aspek permodalan adalah mobilisasi modal awal (*start-up capital*) dan akses ke modal kerja, serta finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan produk jangka pajang.

Keterbatasan modal terutama disebabkan oleh tidak adanya akses langsung mereka terhadap layanan dan fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal (bank) atau lembaga keuangan nonbank. Ini berarti bahwa sebagian besar atau seluruh dana yang diperlukan untuk investasi (perluasan usaha atau peningkatan volume produksi) dan modal kerja berasal dari sumber informal. Sumber pembiayaan ini sangat bervariasi, dapat dari tabungan pribadi (pemilik/pengusaha), pinjaman atau bantuan keuangan dari keluarga atau kenalan, pinjaman dari pemasok bahan baku dalam bentuk pembayaran belakangan, uang dalam bentuk pembayaran dimuka (sebagian atau seluruhnya) dari pembeli, sampai dengan bagian keuntungan yang diinvestasikan (Yusi & Zahri, 2006).

Dengan keterbatasan modal yang dipunyai, upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan baik mutu maupun produktivitas menjadi terhambat. Mutu produk yang kadang seadanya dengan jumlah barang yang dihasilkan juga

kadang terbatas, mengakibatkan peluang pasar yang tadinya dapat mereka raih menjadi terlewatkan. Dukungan modal dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pengusaha untuk mengembangkan usahanya.

Keterbatasan pada sumber daya manusia juga merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha kecil ini, terutama dalam aspek-aspek *entrepreneurship*, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, *engineering design*, *quality control*, organisasi bisnis, akuntansi, *data processing*, teknik pemasaran, dan penelitian pasar. Sedangkan semua keahlian ini sangat dibutuhkan untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas produk, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar, dan menembus pasar baru.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi usaha kecil di atas, peran dan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan salah satu solusi. Mengacu pada UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, BPR didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan, penguatan usaha, kemitraan, maupun pemberian jasa konsultasi bagi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dari definisi tersebut menyiratkan bahwa BPR sebagai salah satu LKM merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan (Baskara, 2013).

BPR melaksanakan kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada

masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah. BPR memberikan layanan keuangan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah ke bawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan. BPR juga merupakan wadah bagi pemberdayaan potensi rakyat yang berbasis pada kemampuan rakyat dengan pendekatan kebersamaan sebagai bagian integral dalam memperkuat perekonomian nasional (Mashudi, 2003).

BPR sebagai bagian dari lembaga keuangan mikro, dalam praktiknya lebih mengena dikalangan pelaku usaha kecil karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan BPR sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil (Wijono, 2005).

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengembangan dan kelangsungan usaha kecil ini memerlukan peran dan keberadaan BPR dalam memenuhi kebutuhan modal dan peningkatan keahlian pengusahanya. Permodalan yang tangguh, sumber daya manusia yang mempunyai keahlian, keterampilan, motivasi tinggi, dan teknologi maju yang mendukung dapat menghasilkan kompetensi inti dalam perusahaan. Kompetensi inti akan menghasilkan keunggulan bersaing.

Keunggulan bersaing pada umumnya mempunyai 2 dasar utama, yaitu biaya rendah dan diferensiasi, dimana keduanya dihasilkan dari kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan kekuatan-kekuatannya secara lebih baik dibandingkan dengan para pesaingnya. Kedua jenis variabel dari keunggulan bersaing yang digabungkan dalam cakupan aktivitas yang hendak dicapai oleh perusahaan akan menghasilkan 3 strategi generik yang berguna untuk mencapai kinerja di atas rata-rata. Ketiga strategi generik itu adalah strategi ke-

unggulan biaya, strategi diferensiasi, dan strategi fokus (Porter, 2001).

Suatu perusahaan yang mempunyai keunggulan dalam bersaing akan mempunyai dampak positif pada kemandirian usaha, berupaya secara gigih melakukan kombinasi dari sumber daya ekonomi yang tersedia, mampu menciptakan produk dan teknik usaha baru, mampu mencari peluang baru, bekerja dengan metode kerja yang lebih efektif dan efisien, cepat mengambil keputusan, dan berani mengambil resiko (Utami, 2006). Selanjutnya kondisi ini akan berpengaruh pada perkembangan usaha berupa peningkatan omset penjualan, peningkatan aset usaha, dan kepastian pasar. Lebih lanjut usaha tersebut akan mempunyai kesinambungan dalam berusaha, mampu mengatasi setiap fluktuasi bisnis, peningkatan skala usaha, serta mampu bersaing dengan produk usaha besar dan impor.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah program-program yang telah dijalankan oleh BPR berdampak positif terhadap upaya pengembangan usaha kecil khususnya sektor pangan. Pemahaman terhadap tujuan ini penting sebab dengan diketahuinya upaya yang telah dijalankan oleh BPR, ada harapan usaha kecil sektor pangan di Sumatera Selatan untuk berkembang maju.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha kecil sektor pangan di Sumatera Selatan. Sampel diambil dengan metode *stratified random sampling*, dengan strata unit usaha potensial. Dari 14 kabupaten dan kota yang memiliki sentra usaha kecil di Sumatera Selatan, terpilih Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, dan Muara Enim yang memiliki unit usaha terbesar di antara kecamatan-kecamatan yang ada lainnya. Jumlah sampel ditetapkan 225 pengusaha, dengan perincian 75 pengusaha di Kabupaten Ogan Komering

Bank Perkreditan Rakyat: Terobosanstrategis bagi Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Kecil

M. Syahirman Yusi

Ilir, 75 pengusaha di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan 75 pengusaha di Kabupaten Muara Enim. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2014 sampai Juni 2014.

Untuk mengidentifikasi kapasitas usaha kecil sektor pangan di daerah penelitian, beberapa variabel kunci yang saling terkait dikelompokkan menjadi variabel sebab dan variabel akibat. Dalam analisis menggunakan metode SEM dapat terjadi variabel sebab menjadi variabel akibat bagi variabel lain. Definisi operasional variabel yang akan dilibatkan dalam proses analisis dapat dilihat pada Tabel 1.

Data primer diperoleh dengan mendatangi dan melakukan wawancara terhadap responden dengan berpedoman pada kuisioner yang kemudian akan diklarifikasi dengan wawancara mendalam.

Untuk keperluan analisis, data yang diperoleh dalam bentuk skala ordinal ditransformasikan ke dalam skala interval. Adapun langkah-langkah mentransformasikan data ordinal ke da-

lam data interval adalah dengan menggunakan *method of succesive interval* (MSI), yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan perangkat lunak MSI yang terintegrasi dalam program *microsoft excel*. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis uji beda rata-rata anova dan *structural equation modeling* (SEM) untuk menguji hipotesis dan mengkonfirmasi model teoritis yang dibentuk (Solimun, 2002).

HASIL

Data hasil penelitian disajikan dalam SEM dengan menggunakan program AMOS dengan sumber data yang telah disiapkan, komputasi akan menghasilkan *standardized estimates measurement model confirmatory factor analysis* dari data yang disajikan tersebut. Hubungan antara variabel penyebab dan variabel akibat yang menunjukkan adanya total pengaruh dari masing-masing variabel yang terdapat dalam model sebagaimana digambarkan dalam paradigma penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Tabel 1. Definisi Operasional

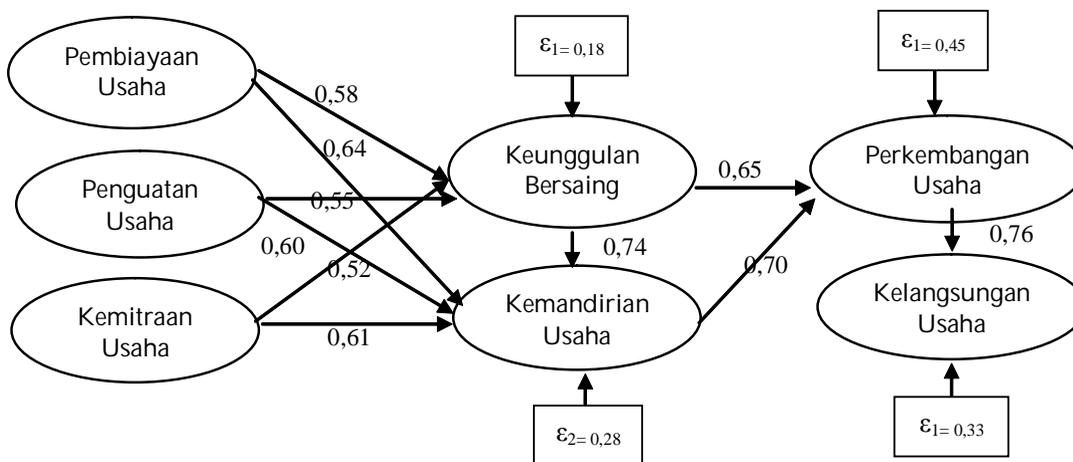
Variabel	Keterangan	Skala
Pembiayaan Usaha (X ₁)	Kebersediaan dan kemudahan BPR dalam membantu permodalan usaha kecil.	Ordinal
Penguatan Usaha (X ₂)	Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pengelolaan usaha kecil.	Ordinal
Kemitraan Usaha (X ₃)	Kerjasama yang sinergis antara BPR dan usaha kecil dalam beberapa bidang yang dibutuhkan.	Ordinal
Keunggulan Bersaing (X ₄)	Keunggulan melalui strategi generik, yaitu strategi yang menekankan pada keunggulan biaya rendah, diferensiasi, dan fokus.	Ordinal
Kemandirian Usaha (X ₅)	Kemampuan wirausaha sendiri tanpa ketergantungan penuh dengan pihak lain.	Ordinal
Perkembangan Usaha (X ₆)	Adanya peningkatan aset dan omset penjualan dari waktu ke waktu.	Ordinal
Kelangsungan Usaha (X ₇)	Keberlanjutan dalam menjalankan usaha disertai dengan perubahan dalam skala usaha	Ordinal

Selanjutnya uji kesesuaian (*goodness of fit indices*) dilakukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan telah memenuhi persyaratan analisis. Dari hasil uji model penelitian nampak pada Tabel 2.

Dari hasil uji kesesuaian dalam Tabel 2 terlihat bahwa ternyata model analisis dapat diterima atau dapat dikatakan memiliki sebuah makna tertentu yang disebut *unidimensionality* atau fenomena yang unidimensi sebagai suatu konsep baru yang telah teruji secara faktual berdasarkan data empiris.

PEMBAHASAN

Hasil dari perhitungan dengan analisis SEM dari Gambar 1 terlihat, bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiayaan usaha yang diberikan BPR (X_1) terhadap keunggulan bersaing usaha kecil (X_4), artinya hipotesis diterima. Pengaruh langsung pembiayaan usaha terhadap keunggulan bersaing sebesar 0,58. Di samping itu, pembiayaan usaha juga berpengaruh positif terhadap kemandirian usaha (X_5), yaitu sebesar 0,64, pengaruh ini cukup kuat. Ini berarti



Gambar 1. Diagram Jalur Model Persamaan Struktural antar Variabel Penelitian

Tabel 2. Uji Kesesuaian (*Goodness of Fit Indices*) Overall Model

<i>Goodnes of fit Index</i>	<i>Cut off Value</i>	Hasil Model	Keterangan
χ^2 - Chi square		14,084	Baik
Derajad bebas, df		9	Diterima
Significance Probability	$\geq 0,05$	0	Diterima
RMSEA	$\leq 0,08$	0,052	Diterima
GFI	$\geq 0,90$	0,914	Diterima
AGFI	$\geq 0,90$	0,918	Diterima
CMIN/DF	$\leq 2,00$	1,542	Diterima
TLI	$\geq 0,95$	0,957	Diterima
CFI	$\geq 0,95$	0,961	Diterima

Bank Perkreditan Rakyat: Terobosanstrategis bagi Penguatan Kelembagaan dan Pembiayaan Usaha Kecil

M. Syahirman Yusi

pembiayaan usaha berperan aktif dalam menumbuhkan keunggulan bersaing dan kemandirian usaha kecil.

Dari hasil perhitungan memperjelas bahwa keberadaan BPR sebagai salah satu sumber penyedia pembiayaan usaha kecil menjadi semakin penting. Pembiayaan menjadi salah satu unsur utama pembentuk keberdayaan lingkungan internal usaha, dan keberadaan BPR merupakan pendekatan terbaik dalam upaya penguatan lingkungan internal usaha kecil dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dalam bentuk bantuan permodalan yang kini dirasa tetap merupakan salah satu faktor penghambat.

Fakta empiris memperlihatkan bahwa bagian terbesar pelaku ekonomi Indonesia merupakan kelompok berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro, serta banyak yang tidak terlayani oleh jasa bank umum karena prosedur yang terlalu menuntut banyak persyaratan. Tanpa akses yang tetap pada jasa perbankan, hampir seluruh kelompok tersebut menggantungkan pembiayaan pada kemampuan sendiri yang sangat terbatas, atau pada lembaga keuangan informal (rentenir, tengkulak, dan pelepas uang), yang membatasi kemampuan kelompok tersebut untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan (Krishnamurti, 2005).

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hafsah (2004) yang menyatakan bahwa masalah permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan usaha kecil. Kurangnya permodalan usaha kecil oleh karena pada umumnya merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan pada modal si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Hasil kajian Susilo *et al.* (2008) juga menjelaskan bahwa masalah utama yang dihadapi oleh pengusaha kecil di Kabupaten Bantul DIY adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial terhadap pihak lain dan keterbatasan untuk menambah modal.

Penguatan usaha (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing (X_4)

dengan koefisien pengaruh sebesar 0,55 dan 0,60 terhadap kemandirian usaha (X_5), dari perhitungan tersebut memberi indikasi bahwa penguatan usaha yang diberikan BPR mempunyai peran dalam keunggulan bersaing dan kemandirian usaha.

Penguatan usaha khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi penting, sebab selama ini sumber daya manusia usaha kecil berangkat dari rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya keahlian, dan kurangnya penguasaan teknologi. Hal ini semakin terlihat bila dikaitkan dengan skala usaha, biasanya usaha kecil tumbuh dan berkembang secara alamiah. Banyak di antara mereka tidak menempuh jenjang perguruan tinggi, bahkan sebagian mereka ada yang hanya mengeenyam pendidikan dasar.

Rendahnya kemampuan dan keahlian yang dipunyai menyebabkan rendahnya kemampuan dan kualitas sumber daya manusia pengusahanya. Akibatnya adalah pengusaha kurang mampu untuk mengelola keuangan dengan baik, kurang pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dan modifikasi produksi, hasil produksi, produktivitas kerja, dan teknik pemasaran. Penguatan merupakan faktor penting untuk mengubah keterbelakangan ekonomi dan membangkitkan kemampuan serta motivasi untuk maju, maka merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dalam bentuk pelatihan kepada pengusaha kecil ini.

Pengembangan usaha kecil perlu dilakukan baik dalam aspek kewiraswastaan, administrasi, dan pengetahuan serta keterampilan dalam pengembangan usaha (Hafsah, 2004). Lebih lanjut, penelitian Mongid & Notodihardjo (2011) tentang UKM di Malaysia juga menyatakan bahwa untuk berkembang pesat, pengetahuan dan keterampilan memainkan peran penting untuk perkembangan UKM. Pelatihan memberikan kontribusi pemahaman bagi UKM.

Kemitraan usaha (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap keunggulan bersaing (X_4)

dengan koefisien pengaruh sebesar 0,52 dan 0,61 terhadap kemandirian usaha (X_5), dari perhitungan tersebut memberi indikasi bahwa aktivitas kemitraan usaha telah mempunyai peran dalam penguatan keunggulan bersaing dan kemandirian usaha.

Fakta menunjukkan bahwa umumnya pengusaha kecil di daerah penelitian dalam menjalankan aktivitas usahanya masih bersifat sederhana dan kurang menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang ideal disertai pola pikir yang masih terbatas. Dengan pola pikir yang masih terbatas tersebut, membuat pengusaha kurang dapat melaksanakan aktivitas terutama di bidang keuangan dan akuntansi. Banyak usaha kecil tidak mampu membuat atau menyajikan laporan keuangan yang sederhana sekalipun. Oleh karena itu, usaha kecil tersebut kurang dapat melaksanakan usaha bisnisnya dalam perspektif keuangan jangka panjang terutama berkaitan dengan evaluasi dan penilaian dampak investasi yang dilakukan.

Dengan kemitraan usaha yang telah dijalankan, pengetahuan tentang aspek-aspek manajerial dapat meningkat. Pertama, pengusaha mampu mengontrol dan mengatur arus uang kas sehingga mampu dalam membuat perencanaan dan laporan keuangan. Kedua, pengusaha mampu mengorganisasikan diri dan karyawan, sehingga terjadi pembagian kerja yang jelas dan pengusaha tidak bertindak rangkap kerja *one man one show*. Ketiga, produktivitas pekerja dapat meningkat dengan cara meningkatkan disiplin, tanggung jawab, loyalitas, pemahaman, dan etos kerja.

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan yang kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan masing-masing pihak akan diberdayakan (Sriyana, 2010). Sehubungan dengan aktivitas kemitraan ini, di Singapura pemerintah membentuk lembaga bernama SPRING guna membantu pengembangan UMKM yang bekerja ber-

sama para mitra untuk membantu perusahaan UMKM dalam pembiayaan, dan pengembangan kemampuan manajemen, teknologi inovasi, dan akses ke pasar (Mongid & Notodihardjo, 2011).

Keunggulan bersaing (X_4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian usaha (X_5) dengan koefisien pengaruh sebesar 0,74 dan 0,65 terhadap perkembangan usaha (X_6), dari perhitungan tersebut memberi indikasi bahwa keunggulan bersaing dengan 2 dasar utama, yaitu biaya rendah dan diferensiasi, mempunyai peran dalam kemandirian dan perkembangan usaha yang dijalankan. Hal ini sejalan dengan teori Porter (2001) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan daya saing perusahaan harus menciptakan keunggulan melalui strategi generik, yaitu strategi yang menekankan pada keunggulan biaya rendah, diferensiasi, dan fokus. Dengan strategi ini, perusahaan akan memiliki daya tahan hidup (*survive*) secara berkesinambungan dan mampu bersaing dengan perusahaan lain.

Kemandirian usaha (X_5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha (X_6) dengan koefisien pengaruh sebesar 0,70. Hasil perhitungan tersebut memberi indikasi bahwa kemandirian usaha yang dicirikan dengan adanya kemampuan wirausaha sendiri tanpa ketergantungan penuh dengan pihak lain, mempunyai peran dalam perkembangan usaha. Pada akhirnya perkembangan usaha (X_6) mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kelangsungan usaha (X_7), dengan koefisien pengaruh sebesar 0,76. Tidak berbeda jauh dengan temuan di atas, Utami (2006) dalam penelitiannya juga menemukan hubungan antara kemandirian dengan tingkat kemajuan usaha.

Dari analisis di atas terlihat betapa pentingnya keberadaan dan peran BPR bagi penguatan kelembagaan dalam kelangsungan usaha kecil di daerah penelitian. Dalam konsep ini perhatian harus ditekankan pada penciptaan nilai tambah untuk meraih keunggulan daya saing (*competitive ad-*

vantages) melalui pengembangan kapabilitas khusus (kewirausahaan), sehingga usaha kecil tidak lagi mengandalkan strategi kekuatan pasar melalui fasilitas monopoli dan fasilitas pemerintah. Dalam strategi ini diharapkan usaha kecil dapat mengarahkan pada keahlian secara internal yang dapat menciptakan produk inti yang unggul untuk memperbesar pangsa produksi. Strategi tersebut lebih murah dan ampuh dalam mengembangkan usaha kecil, karena usaha kecil dapat memanfaatkan sumber daya lokal.

Dari temuan tersebut dapat dikatakan bahwa analisis dan konsep yang diajukan sejalan dengan temuan-temuan peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa lingkungan internal perusahaan harus mendukung yang mencakup banyak aspek, mulai dari pemberian kredit usaha yang tidak memberatkan, penguatan usaha, hingga kemitraan usaha yang mempunyai pengaruh positif terhadap penguasaan teknologi dan informasi, struktur organisasi, budaya bisnis, sistem manajemen, jaringan bisnis, hingga tingkat *entrepreneurship*. Dalam hal ini BPR mempunyai andil yang tidak kecil. BPR sebagai lembaga keuangan mikro memiliki peran strategis sebagai intermediasi dalam aktivitas perekonomian bagi masyarakat perdesaan (Hendayana & Bustaman, 2007).

Implikasi Kebijakan

Secara sederhana dapat dikatakan agar suatu perusahaan dapat bersaing baik di pasar domestik maupun ekspor selain lingkungan eksternal, lingkungan internal dalam perusahaan harus kokoh, dan untuk membuatnya kokoh perlu upaya penguatan di dalam dan juga dari luar sebagai penyangga (Sjarkowi & Sufri, 2004). Pengalaman Indonesia selama 30 tahun ke belakang terutama pada masa resesi ekonomi 1997, memberikan informasi dan sekaligus pelajaran berharga, bahwa pada masa lalu runtuhnya perekonomian Indonesia ternyata sebagai akibat dari kurang mampunya pengambil

keputusan di pemerintahan Indonesia saat itu dalam merespon berbagai isu kritis akan pentingnya menumbuhkembangkan ekonomi skala kecil. Pada saat itu perekonomian Indonesia hanya bertumpu pada beberapa usaha skala besar (konglomerat). Oleh karena itu respon yang cepat dan tepat terhadap ekonomi rakyat (skala mikro dan kecil) akan sangat bermanfaat bagi kemungkinan ketahanan dan sekaligus keamanan perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Pentingnya keberadaan BPR sebagai salah satu bentuk LKM yang dapat menunjang berkembang dan lajunya ekonomi rakyat (skala mikro dan kecil) ini telah membuat PBB pada tanggal 18 November 2004 telah mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun kredit mikro internasional. Dalam rangka tahun kredit tersebut, Indonesia telah dipilih PBB sebagai salah satu dari 8 negara yang dijadikan *real model* untuk membangun *microfinance* di dunia (Endri, 2008).

Adanya perintah dari Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyiratkan agar kegiatan usaha kecil didukung oleh sistem keuangan yang memadai. Misalnya didukung oleh adanya sumber pendanaan yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan usaha, adanya suatu lembaga keuangan yang berfungsi dalam penyalurannya, ada mekanisme penjaminan, dan bahkan asuransinya. Bahkan bagi usaha-usaha pemula disediakan *skim* khusus untuk mendukung usahanya, dan sumbernya tidak semata-mata dari perbankan tetapi dari anggaran pemerintah yang disalurkan melalui berbagai bentuk lembaga keuangan baik bank maupun nonbank. Lembaga keuangan bank juga diberikan insentif khusus bagi mereka yang melayani usaha kecil. Sejalan dengan itu dibentuk pula lembaga penjaminan yang dimaksudkan untuk membantu kolateral usaha kecil yang usahanya layak dan berkembang, tetapi tidak dapat mengakses sumber keuangan karena keterbatasan agunan yang dimiliki.

Dalam hal pembiayaan usaha, banyak pihak meyakini peran BPR sebagai lembaga keuangan mikro sebagai suatu alat pembangunan yang efektif dalam memajukan usaha kecil karena layanan keuangan yang diberikan, memungkinkan pengusaha kecil untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset, dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Penyediaan pembiayaan yang tidak memberatkan diyakini akan sangat membantu perkembangan usaha kedepan.

BPR pada dasarnya sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pembangunan ekonomi rakyat utamanya sebagai lembaga untuk fasilitasi jasa pembiayaan usaha kecil. Hal itu didasarkan fakta bahwa hampir sebagian besar pengusaha kecil menghadapi persoalan adopsi teknologi karena lemah dalam permodalan. Modal merupakan penggerak pokok bagi pengembangan usaha. Modal dapat membantu pengusaha kecil dalam mengatasi keterbatasan modal dengan bunga relatif kecil dan mengurangi ketergantungan mereka pada pedagang perantara dan pelepas uang (Ashari, 2009).

Penguatan usaha khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia juga merupakan aspek penting bagi perkembangan usaha kecil. Soewardi (2001) menyatakan perlunya penguatan berupa pembinaan dan pelatihan karena dengan pembinaan dan pelatihan dapat meningkatkan kinerja, baik dalam bidang produksi maupun pemasaran, dimensi sikap, persepsi, dan tingkah laku. Soewardi mensinyalir sebagian besar pengusaha kecil kurang dalam motivasi, lemah dalam karsanya, dan respon mereka lamban untuk berproduksi sesuai permintaan, bila permintaan meningkat produksi mereka tidak serta merta naik.

Dalam hal teknologi yang digunakan usaha kecil di daerah penelitian juga masih sangat beragam dan belum mengalami pengembangan yang dapat membuat produk terstandarisasi. Dalam menghasilkan sebuah produk yang sama kadang digunakan teknologi yang berbeda sehingga mutu produk sangat beragam. Dalam praktek perda-

ngan, keragaman mutu yang tinggi merupakan faktor pembentuk ketidakpastian pasar sehingga menghambat penguasaan dan perluasan pasar. Kaitannya dengan usaha kecil, rendahnya teknologi yang digunakan disebabkan oleh terbatasnya faktor pendanaan, kesempatan dalam memperbaiki teknologi, dan terbatasnya kesempatan mencoba teknologi yang terbaru.

Kemitraan merupakan suatu jawaban untuk meningkatkan kesempatan berkiprahnya usaha kecil dalam percaturan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Dengan kemitraan telah memungkinkan terjadinya alih teknologi dan pengetahuan serta kemampuan manajerial kepada pengusaha. Dengan demikian akan berdampak pada perbaikan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia usaha kecil sehingga menjadi lebih mandiri dan profesional (Iwantono, 2004).

Filosofi hakiki dari kemitraan yang terkandung dalam UU Nomor 9 tentang Usaha Kecil tahun 1995 mengandung makna sebagai tanggung jawab moral adalah kebersamaan dan pemerataan. Dengan demikian kemitraan akan selalu dibutuhkan selama tuntutan pemerataan belum teratasi. Di lain pihak kemitraan adalah suatu proses jangka panjang yang berubah secara dinamis untuk memenuhi harapan dan kebutuhan dari seluruh pelaku kemitraan. Melalui kemitraan antara BPR dengan usaha kecil dapat meningkatkan produktivitas, pangsa pasar, menjamin pasokan bahan baku, meningkatkan keuntungan, sama-sama menanggung risiko, dan distribusi pemasaran.

Oleh karena itu, temuan penelitian mendukung pendapat para ahli betapa perlunya penyediaan jasa keuangan, penguatan, dan kemitraan usaha dari BPR dalam memperkuat lingkungan internal perusahaan. Dalam situasi yang masih terbatas, baik dalam bidang produksi yang sifat produknya masih konvensional, bidang pemasaran yang kadang tidak menjamin kontinuitas produk

yang dipasarkan, maupun sumber daya manusia yang dalam banyak hal masih perlu ditingkatkan tingkat pengetahuan dan wawasannya, jasa konsultasi mutlak perlu diberikan agar terjadi peningkatan dalam bidang-bidang dimaksud.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Program yang telah dilakukan BPR baik dalam bentuk pembiayaan usaha, penguatan sumberdaya manusia, maupun kemitraan telah berperan aktif dalam membangun dan memperkuat lingkungan internal usaha kecil sektor pangan di Sumatera Selatan. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan BPR sebagai salah satu lembaga keuangan mikro mempunyai andil yang tidak kecil bagi penguatan kelembagaan dan pembiayaan usaha kecil. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah program-program yang telah dijalankan oleh BPR berdampak positif terhadap upaya pengembangan usaha kecil khususnya sektor pangan.

Lebih lanjut, dari hasil analisis dengan menggunakan analisis uji beda rata-rata anova dan SEM juga diperoleh hasil bahwa semua variabel penyebab memberikan nilai yang positif dan berpengaruh nyata pada variabel akibat, ini berarti bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima. Selain itu dari uji kesesuaian (*goodness of fit indices*) dapat menerima model yang dibentuk. Ini berarti bahwa semua variabel penelitian yang dilibatkan dalam analisis dapat dipertanggungjawabkan sebagai model penelitian.

Saran

BPR sebagai salah satu bentuk LKM perlu digiatkan perannya sebagai upaya menerobos penguatan kelembagaan dan pembiayaan usaha kecil yang akan memberi peluang untuk berperan lebih banyak sebagai pelaku ekonomi. Penguatan

usaha hendaknya lebih memperhatikan kesesuaian dan kebutuhan pengusaha, agar pengusaha dapat lebih merasakan manfaatnya. Kemitraan senantiasa perlu dibangun, agar usaha kecil dapat menerima alih teknologi, pengetahuan, serta kemampuan manajerial yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan lingkungan internal perusahaan sehingga dapat berkembang maju. Berkembang dan majunya usaha kecil merupakan salah satu strategi dan kebijakan nasional yang ikut memberi andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya bagi pengembangan ilmu khususnya manajemen usaha kecil dengan melihat beberapa variabel yang dilibatkan bagi penguatan kelembagaan dan pembiayaan usaha. Persoalan lain di luar model masih banyak yang memungkinkan bagi peneliti lain untuk mengamatinya secara empiris. Penelitian lanjutan masih diperlukan agar masalah yang belum terungkap dalam penelitian ini dapat lebih didekati, hal ini penting mengingat usaha kecil adalah usaha rakyat yang sampai saat ini masih menyimpan potensi dan menyerap banyak tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari. 2009. Analisis dan Kinerja Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM LUEP) Studi Kasus: Kabupaten Ngawi Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(2): 147-168.
- Baskara, I.G.K. 2013. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 18(2): 114-125.
- Endri. 2008. Analisis Peran Perbankan dalam Pengembangan Keuangan Mikro. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 29(13): 1229-1235.
- Hafsah, M.J. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Infokop*, 25(20): 40-44.
- Hendayana, R. & Bustaman, S. 2007. Fenomena Keuangan Mikro dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Perdesaan. *Litbang Kementerian Pertanian*, 1-12.

- Iwantono, S.. 2004. Pengembangan Kemitraan Usaha Pola Sub Kontrak Berlandaskan Persaingan Sehat. *Infokop*, 25(20): 107-112.
- Krishnamurti, B. 2005. Pengembangan Keuangan Mikro bagi Pembangunan Indonesia. *Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat*, 3(4): 20-26.
- Mashudi, A. 2003. *Microfinance Opini 2003*.
- Mongid, A. & Notodihardjo, FX.S. 2011. Pengembangan Daya Saing UMKM di Malaysia dan Singapura: Sebuah Komparasi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 15(2): 243-253.
- Porter, M.E. 2001. *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. New York: The Free Press.
- Sjarkowi, F. & Sufri, M. 2004. *Manajemen Agribisnis*. Palembang: Baldad Grafiti Press.
- Soewardi, H. 2001. *Roda Berputar Dunia Bergulir: Kognisi Baru tentang Timbul-Tenggelamnya Sivilisasi*. Bandung: Bakti Mandiri.
- Solimun. 2002. *Multivariate Analysis: Structural Equation Modelling (SEM), Lisrel, dan Amos*. Universitas Negeri Malang.
- Sriyana, J. 2010. Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul. *Simposium Nasional 2010*.
- Susilo, S.Y., Krisnadewara, P.D., & Soeroso, A. 2008. Masalah dan Kinerja Industri Kecil Pascagempa: Kasus di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Bantul (DIY). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Manajemen*, 15(2): 271-280.
- Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Utami, H.N. 2006. Keberdayaan, Kemajuan, dan Keberlanjutan Usaha Pengrajin: Kasus Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Arthavidya*, 7(3): 631-641.
- Wijono, W.W. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. *Jurnal kajian Ekonomi dan Keuangan*, 11(5): 86-100.
- Yusi, M.S & Zahri, I. 2006. Survei Kapasitas Industri Kecil Pengolahan Kopi di Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1): 27-40.